BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk dapat melaksanakan pembangunan, khususnya Pemerintah Kota Bandung yang mobilitas barang dan jasa di Kota Bandung cepat maka diperlukan berbagai peralatan seperti gedung, kantor, jalan, jembatan, mesin-mesin, kertas-kertas alat-alat tulis dan lain sebagainya. Semuanya ini disebut barang milik/kekayaan negara atau Pemerintah sebagai sarana pembangunan negara. Barang Milik Negara pada umumnya berasal dari pembelian yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana diluar APBN, yang dikuasai/dibawah pengurusan Departemen/Lembaga.

Semua barang milik negara atau dikuasai oleh negara harus dikelola dengan baik dengan menggunakan suatu pola atau sistem pembinaan barang yang biasa disebut fungsi logistik. Fungsi logistik terdiri dari berbagai kegiatan yan satu sama lain saling terkait dan merupakan suatu siklus tertentu yang disebut siklus logistik yang terdiri dari :

1. Perencanaan (*planing*).
2. Penentuan Kebutuhan (*requirement*).
3. Pengangggaran (*budgeting*).
4. Pengadaan (*procurement*).

5. Penyimpanan dan penyaluran (*storage and distribution*).
6. Pemeliharaan (*maintenance*).
7. Penghapusan (*disposal*).
8. Pengendalian (*controling*).

Semua fungsi logistik tersebut sangat erat kaitannnya satu sama lain.

Pengelolaan keuangan negara merupakan tugas seorang bendaharawan, baik dalam bentuk penyimpanan, penyaluaran dana melalui sistem administrasi yang baik. Pengelolaan keuangan negara merupakan mata rantai tak terpisahkan dalam pengelolaan pembangunan. Lebih dari itu sistem pengelolaannya haruslah ditangani secara profesional. Hal tersebut dilakukan agar penggunaan keuangan negara sesuai dengan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Keppres No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

APBN merupakan perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebutkan dengan perencanaan operasional tahunan yang memiliki kurun waktu selama satu tahun, karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasaran yang ada didalamnya kiranya dapat disajikan secara lebih konkrit, misalnya berapa hektar sawah dalam tahun anggaran bersangkutan yang harus diairi dan dimana saja lokasinya, berapa kilometer jalan yang harus dibangun, berapa ribu orang yang dapat ditampung disekolah dasar dan dimana saja penyebarannnya sekaligus dengan besar dan dimana saja penyebaran sekaligus dengan besaran *plafond* atau biaya.

Perencanaan pengeluaran Pemerintah ini dilaksanakan oleh dua lembaga yang betanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran, yaitu Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan kriteria yang mungkin dapat dipergunakan untuk penentuan prioritas pada pengalokasian pengeluaran Pemerintah adalah faktor lingkungan, faktor tehnologi, faktor ekonomi, dan faktor politis. Beranjak dari kriteria di atas, pengeluaran Pemerintah dapat diklasifikasikan menurut Sektor, Subsektor.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Dari alokasi Anggaran masing-masing Departemen, tampaknya tidak mesti merata, misalnya Departeman Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran yang terbesar. Hal ini wajar karena Departeman Pekerjaan Umum kebetulan mempunyai tanggung jawab pada sektor-sektor yang justru mempunyai tanggung jawab pada sektor-sektor yang justru membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan/jembatan, bendungan dan lain sebagainya.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam hal ini KPKN Bandung merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam rangkaian prosedur penyaluran Dana Proyek Pembangunan. Dana Proyek Pembangunan yang disalurkan oleh KPKN Bandung dari APBN dan bantuan luar negeri tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Peraturan ini diterapkan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana proyek pembangunan maka penulis mengajukan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini dengan judul : **"Prosedur**

Penyaluran Dana Proyek Pembangunan Pada Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) Bandung".

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Penyaluran Dana Proyek Pembangunan pada KPKN Bandung.
2. Untuk mengetahui bahan, mesin alat yang diperlukan dalam Prosedur Penyaluran Dana Pembangunan.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini dapat memberi daya guna bagi :

1. Bagi Penulis
   a. Memperoleh banyak pengetahuan mengenai Proses Penyaluran Dana Proyek Pembangunan pada KPKN Bandung.
   b. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang belum di dapat selama berada di bangku kuliah.
   c. Dapat menjadi sarana studi perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan dunia usaha secara nyata.
   d. Menjadi sarana penulis untuk mempraktekan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan yang dapat dijadikan bekal pada masa yang akan datang.

2. Perusahaan/Instansi

   a. Hasil dari Kuliah Kerja Praktek ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan dalam upaya menentukan kebijakan perusahaan terutama mengenai Prosedur Penyaluran Dana Proyek Pembangunan pada KPKN Bandung.

   b. Adanya hubungan kerjasama yang baik antara Perusahaan/Instansi dengan Perguruan Tinggi, khususnya di dalam mempersiapkan kualitas SDM yang siap pakai.

   c. Dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Umum

   a. Dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi pembaca.

   b. Dapat menambah wawasan dan sumber informasi bagi yang tertarik dengan topik yang diangkat.

   c. Dapat menjalin silaturahmi antara penulis dengan pembaca.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Metode yang digunakan selama Kuliah Kerja Praktek pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung 40261 adalah dengan metode *semi blok release* yaitu metode pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dalam satu periode tertentu selama 23 hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Juni sampai dengan 30 Juni 2003.

1.5 Lokasi dan waktu Kuliah Kerja Praktek

Lokasi penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung 40261 pada Seksi Perbendaharan II. Adapun pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dilakukan dari tanggal 4 Juni sampai dengan 30 Juni 2003.

Kuliah Kerja Praktek dilakukan setiap hari kerja Senin sampai Jumat yang waktunya disesuaikan dengan jadwal kuliah (Absensi terlampir). Berikut penulis sampaikan Jadwal Kuliah Kerja Praktek :

Hari	Waktu	Keterangan
Senin – Jum'at	07.30 – 17.00 Wib	Jam Kerja
Senin - kamis	12.00 – 13.00 Wib	Istirahat
Jum'at	11.30 – 13.00 Wib	Istirahat
Sabtu - Minggu	_	Libur